

### 4.3 Hak untuk Mandapatkan Kesehatan dan Kesejahteraan (KB)

Perumusan masalah yang dilakukan berdasarkan situasi ibu dan anak yang berkaitan dengan belum terpenuhinya hak ibu mendapatkan kesetaraan gender dalam ber KB, Berdasarkan data situasi ibu dan anak di Kabupaten Polewali Mandar baik itu data hasil survey, sensus dan data sektoral MDGs.

#### A. Penilaian situasi

##### 1. Perumusan masalah pada bidang kesehatan sebagai berikut:

- a) Masih rendah pemakaian alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun sebesar 54,32%
- b) Kurangnya penggunaan kondom dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya
- c) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya alat kontrasepsi
- d) Banyaknya alat kontrasepsi yang ditujukan kepada perempuan
  - 1) Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) tidak paham dengan manfaat alat kontrasepsi.
  - 2) Masih banyak dan pasangan usia subur kurang mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi (kespro).

##### 2 Penggambaran besarnya permasalahan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka dapat ditentukan prioritas masalah situasi ibu dan anak digambarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 65**  
Penentuan Peringkat Masalah

No	Masalah	Masalah Strategis	Melibatkan Lintas Sektor	Masalah Bersama	Urgensi	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	Rendahnya Pemakaian Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur	5	-Kesehatan -Sosial 3	3	3	14	2
2	Kurangnya Angka Pengguna Kondom	5	-Kesehatan -Pariwisata 3	3	3	14	2
3	Kurangnya pemahaman terhadap Alat Kontrasepsi	5	Kesehatan Dan KB 1	5	5	14	2
4	Banyaknya Alat Kontrasepsi Yang ditujukan terhadap perempuan	3	5 -Kesehatan -Sosial -Perdagangan ( Perusahaan) -Pemberdayaan Perempuan	3	5	16	1

Dari Tabel 65 diatas terlihat bahwa masalah banyaknya alat kontrasepsi yang ditujukan terhadap perempuan menempati urutan peringkat pertama, sebab masalah ini melibatkan lintas sektor yang lebih banyak dan sangat urgen untuk mendapatkan perhatian.

**Tabel 66**  
Tabel Penilaian Situasi Banyaknya Alat Kontrasepsi yang Ditujukan Terhadap Perempuan

Masalah pokok	Kelompok siklus hidup yang paling terkena dampak permasalahan	Cakupan besarnya/tingkat keparahan/populasi terdampak	Hak dan kewajiban yang belum terwujud dengan merujuk pada pasal dan uu	Indikator
Banyaknya Alat Kontrasepsi yang ditujukan terhadap perempuan	Pasangan Usia Subur ( PUS ) 25-49 Tahun	Jumlah peserta KB perempuan Pada tahun 2008 sebesar 97,88% Tertinggi di Kec.Matakali. Pada tahun 2009 sebesar 99,53% tertinggi di Kec.Balanipa	-Hak atas kesehatan Dan kesejahteraan	-Persentase pengguna Alat Kontrasepsi pada PUS (Perempuan) dari 97,88% menjadi 96,24 % tahun 2009

Dari table 66 diatas terlihat bahwa masalah banyaknya Alat Kontrasepsi yang ditujukan pada perempuan memiliki cakupan yang cukup tinggi persentase yang mencapai 96.24% pada tahun 2009. Sedangkan persentase laki-laki masih sangat kecil. Ini berimplikasi pada persoalan pemenuhan hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan khususnya pada perempuan, dimana alat kontrasepsi masih lebih diarahkan pada perempuan. Padahal seharusnya laki-laki juga perlu menjadi target sasaran. Kelihatan bahwa ada kecenderungan ketidakadilan gender bagi perempuan terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi.

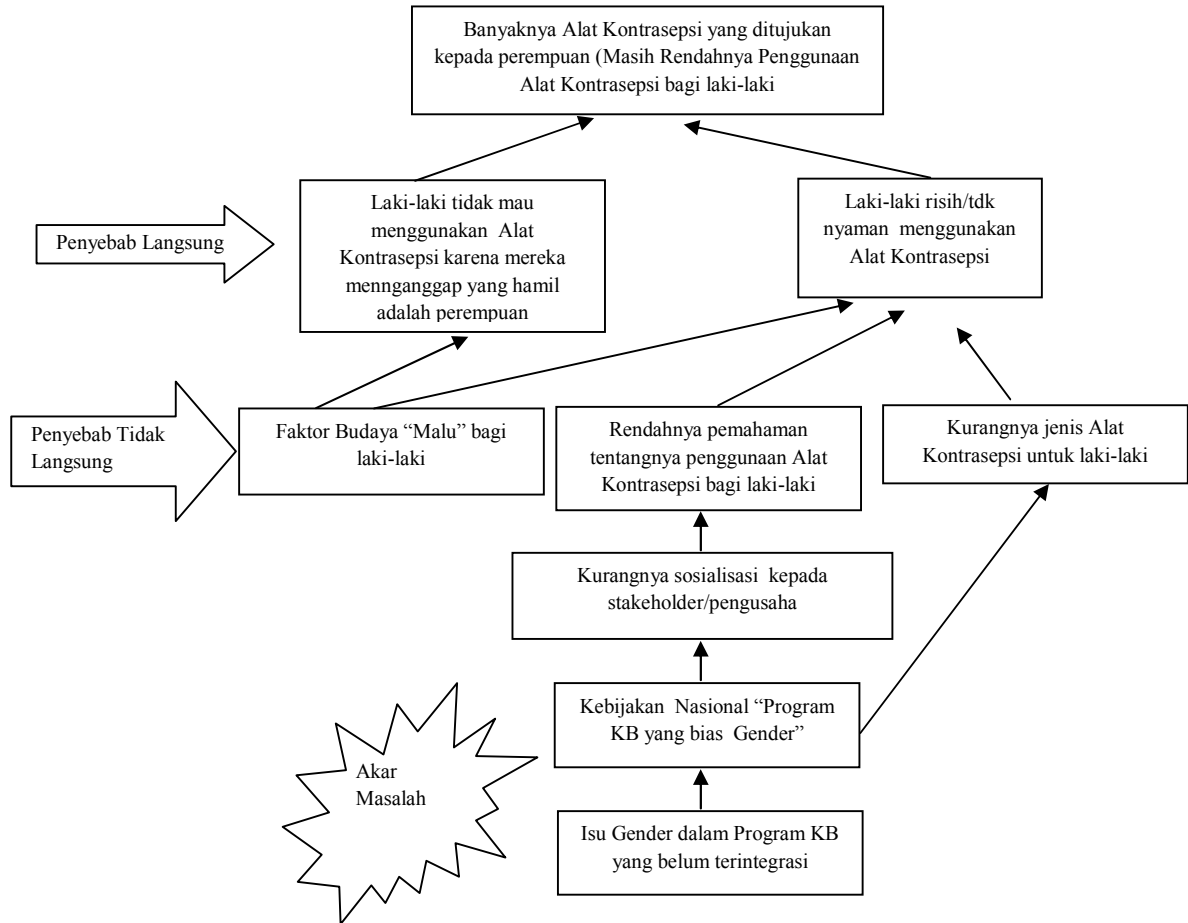
## **B. Telaahan atau Analisis**

### **1 Analisis Kausalitas (sebab-akibat)**

Berdasarkan prioritas masalah yang telah ditentukan di atas untuk melihat hubungan sebab akibat permasalahan banyaknya alat kontrasepsi yang ditujukan terhadap perempuan, maka prioritas masalah dibuatkan pohon masalah sebagai berikut. Perlunya dibuat pohon masalah, agar permasalahan yang terdapat dalam sektor KB dapat diketahui penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan akar penyebabnya. Untuk masalah tersebut dibawah lebih melihat sisi partisipasi perempuan dalam mengikuti KB sehingga permasalahan ini memperlihatkan ketimpangan gender dalam mengikuti KB.

**Gambar 11**

**Pohon Masalah Banyaknya Pemakaian Alat Kontrasepsi pada Perempuan**



Analisis kausalitas banyaknya alat kontrasepsi yang ditujukan terhadap perempuan di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga menyebabkan masih rendahnya pemakaian alat kontrasepsi pada laki-laki, hal ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor yang berkontribusi langsung (penyebab langsung) terhadap banyaknya alat kontrasepsi yang ditujukan terhadap perempuan, yaitu :

- a. Laki-laki tidak mau menggunakan alat kontrasepsi karena mereka menganggap yang hamil adalah perempuan

Rendahnya pemakaian alat kontrasepsi pada laki-laki lebih banyak disebabkan oleh keengganan laki-laki untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini karena adanya anggapan bahwa yang mengalami kehamilan hanya perempuan. Sehingga yang harus memakai alat kontrasepsi adalah perempuan.

b. Laki-laki risih/tdk nyaman menggunakan alat kontrasepsi

Rasa risih serta budaya “Malu” menggunakan alat kontrasepsi seringkali dirasakan oleh laki-laki. Sehingga menyebabkan mereka merasa tidak nyaman apabila harus disuruh untuk menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu, kebanyakan laki-laki risih atau malu menggunakan alat kontrasepsi karena rendahnya pemahaman tentang penggunaan alat kontrasepsi serta adanya anggapan bahwa apabila laki-laki yang memakai alat kontrasepsi (kondom) dapat mengurangi kenikmatan dalam berhubungan. Akibatnya, sangat sedikit laki-laki yang mau menggunakan alat kontrasepsi. Hal tersebut mengakibatkan yang paling banyak menggunakan alat kontrasepsi adalah perempuan, sehingga berdampak pada banyaknya alat kontrasepsi yang ditujukan terhadap perempuan.

Selain permasalahan di atas, tingginya penggunaan alat kontrasepsi yang ditujukan kepada perempuan disebabkan kurangnya ketersediaan alat kontrasepsi yang ditujukan kepada laki-laki. Dibandingkan dengan perempuan, alat kontrasepsi yang ditujukan kepada laki-laki hanya dua yakni kondom dan vasektomi. Sedangkan alat kontrasepsi yang ditujukan kepada perempuan ada lima, yakni: pil, suntik, implant, IUD, dan tubektomi. Melihat kenyataan tersebut, sangat jelas adanya ketimpangan gender dalam ber KB antara perempuan dan laki-laki. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah seharusnya menyediakan lebih banyak lagi alat kontrasepsi untuk laki-laki untuk mengurangi ketimpangan gender dalam ber KB.

## 2. Analisis Pola Peran

### Matriks 101

Pola Peran antara Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak Untuk Masalah Banyaknya Alat Kontrasepsi yang Ditujukan pada Perempuan

Pemegang Hak \ Pengemban Tugas	Suami	Keluarga	Masyarakat	Kecamatan	Kabupaten
Orang Tua	Memberikan pemahaman bahwa laki-laki (suami) juga dapat ber KB	Memberikan pemahaman bahwa laki-laki (suami) juga dapat ber KB	Memberikan pemahaman bahwa laki-laki (suami) juga dapat ber KB		
Keluarga	Mendorong laki-laki (suami) untuk ber KB		Ikut berpartisipasi dan Berperan aktif dalam memberikan pemahaman bahwa laki-laki juga dapat berKB		
RT/RW/Lurah		Memberikan sosialisasi mengenai jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki	Memberikan sosialisasi mengenai jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki	- Mengusulkan program dalam mengkampanyekan jenis alat kontrasepsi	Koordinasi dan pelaporan
Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	Menyediakan Alat Kontrasepsi untuk aki-laki	Memberikan sosialisasi mengenai jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki.	- Memberikan pemahaman tentang pentingnya ber KB	Bekerja sama dalam mensosialisasikan tentang KB	Koordinasi dan Pelaporan
Dinkes / Puskesmas	Melayani Akseptor KB Laki-laki	Melakukan penyuluhan /konseling	Penyuluhan KB	Berkoordinasi	

Matriks pola peran masalah banyaknya alat kontrasepsi yang ditujukan terhadap perempuan di atas, menunjukkan peran strategis berbagai pihak untuk menanggulangi masalah banyaknya alat kontrasepsi (Alkon) yang ditujukan kepada perempuan. Dalam hal ini orang tua dan keluarga memiliki peran yang paling utama untuk memberikan pemahaman bahwa laki-laki (suami) juga dapat ber KB. Selanjutnya, kelurahan/desa memiliki peran untuk memberikan sosialisasi mengenai jenis-jenis alat kontrasepsi serta mengusulkan program dan mengkampanyekan jenis-jenis alat kontrasepsi kepada masyarakat. Kelurahan/Desa dapat menjalin bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, terutama Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) dan Dinas Kesehatan/Puskesmas. Mengingat BKKBPP dan Dinas Kesehatan/Puskesmas merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah khususnya dalam program KB, maka keduanya memiliki peran penting, utamanya memberikan pemahaman mengenai pentingnya ber KB serta memberikan penyuluhan/konseling KB. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah laki-laki yang ber KB, BKKBPP berperan menyediakan alat kontrasepsi bagi laki-laki. Sedangkan Dinas Kesehatan / Puskesmas berperan melayani akseptor KB laki-laki. Apabila telah terjadi pemahaman bahwa laki-laki juga dapat ber KB dan telah dilakukan sosialisasi serta telah tersedia alat kontrasepsi bagi laki-laki, maka masalah mengenai banyaknya alat kontrasepsi yang ditujukan terhadap perempuan akan dapat teratasi.

### 3. Analisis Kesenjangan Kapasitas

#### 3.1 Analisis Kesenjangan Kapasitas Pengemban Tugas

##### Matriks 102

Analisis Kesenjangan Kapasitas Orang Tua sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Kesehatan Bagi Perempuan

PEMEGANG KLAIM KAPASITAS	SUAMI	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang tua masih kurang memberikan pemahaman mengenai bahwa suami juga dapat ber KB</li> <li>Kurang motivasi dan difungsikan dalam memberikan pemahaman mengenai bahwa suami juga dapat ber KB</li> <li>Pemahaman tentang KB bagi laki-laki masih sangat minim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang bertanggung jawab dalam usaha menghilangkan anggapan bahwa yang pantas KB hanya perempuan</li> <li>Orang tua masih kurang memberikan pemahaman mengenai bahwa suami juga dapat ber KB</li> <li>Kurang motivasi dan difungsikan dalam memberikan pemahaman mengenai bahwa suami juga dapat ber KB</li> <li>Seringkali membuat keputusan yang salah</li> <li>Kurang terjalin komunikasi dengan para suami agar tidak risih menggunakan alat kontrasepsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang Terlibat dalam kelompok masyarakat dalam mensosialisasikan jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> <li>Kurang Melibatkan laki-laki dalam mensosialisasikan jenis alat kontrasepsi</li> <li>Tidak terbentuk kelompok masyarakat yang peduli KB</li> <li>-</li> <li>Kurang terjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat keluarga lainnya mengenai jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Memberikan data yang akurat</li> <li>Masih minimnya kepekaan aparat desa terhadap apa yang terjadi. Kurang pengetahuan.</li> <li>Dana anggaran yang tersedia minim.</li> <li>-</li> <li>Tidak mampu memberikan informasi yang akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang Mendapatkan motivasi dan fungsi dalam pengambilan keputusan</li> <li>Membantu kecamatan dalam mensurvei jumlah laki-laki yang ber KB</li> <li>-</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Dari matriks 102 analisis kesenjangan kapasitas orang tua sebagai pengemban tugas terhadap pemegang hak dalam masalah tingginya pemakaian alat kontrasepsi pada perempuan di atas, dapat dilihat bahwa orang tua masih kurang bertanggung jawab dalam usaha menghilangkan anggapan bahwa yang pantas ber KB hanya perempuan, sehingga mengakibatkan masih rendahnya penggunaan Alat Kontrasepsi pada laki-laki. Selain itu, mereka juga masih menganggap bahwa KB itu hanya untuk perempuan.

### Matriks 103

Analisis Kesenjangan Kapasitas Keluarga sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam masalah Hak Kesehatan bagi Perempuan

PEMEGANG KAPASITAS / KEMAMPUAN	SUAMI	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keluarga masih kurang memberikan pemahaman mengenai bahwa suami juga dapat ber KB</li> <li>Kurang motivasi dan difungsikan dalam memberikan pemahaman mengenai bahwa suami juga dapat ber KB</li> <li>Pemahaman tentang KB bagi laki-laki masih sangat minim</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang Terlibat dalam kelompok masyarakat dalam mensosialisasikan jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> <li>Kurang Melibatkan laki-laki dalam mensosialisasikan jenis alat kontrasepsi</li> <li>Tidak terbentuk kelompok masyarakat yang peduli KB</li> <li>-</li> <li>Kurang terjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat keluarga lainnya mengenai jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Memberikan data dan informasi yang akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang Mendapatkan motivasi dan fungsi dalam pengambilan keputusan</li> <li>Membantu kecamatan dalam mensurvey jumlah laki-laki yang ber KB</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

### Matriks 104

#### Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelurahan/Desa sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam masalah Hak Kesehatan bagi Perempuan

PEMEGANG KLAIM / KAPASITAS	SUAMI	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang sosialisasi dengan melibatkan suami sebagai sasaran</li> <li>Masih memiliki pandangan bahwa yang wajib ber KB adalah perempuan, bukan suami</li> <li>Tidak menjadikan suami sebagai sasaran program KB dalam perencanaan di tingkat desa/kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang bertanggung jawab dalam usaha menghilangkan anggapan bahwa yang pantas KB hanya perempuan</li> <li>Kurang motivasi dan berperan dalam memberikan pemahaman mengenai bahwa suami juga dapat ber KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak dilibatkan dalam kelompok masyarakat dalam mensosialisasikan jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> <li>Masih memiliki pandangan bahwa yang wajib ber KB adalah perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Memberikan data yang akurat</li> <li>Masih minimnya kepekaan aparat kecamatan terhadap apa yang terjadi. Kurang pengetahuan.</li> <li>Tidak mampu memberikan informasi yang akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang Mendapatkan motivasi dan fungsi dalam pengambilan keputusan</li> <li>Kurang mensosialisasikan tentang KB untuk laki-laki</li> <li>Intervensi program KB masih dominan kepada perempuan</li> <li>Dana anggaran yang tersedia minim</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Dari Tabel 104 terlihat bahwa kesenjangan kapasitas kelurahan/desa sebagai pengemban tugas diantaranya belum melibatkan para suami dalam kegiatan sosialisasi KB. Selain itu masih dominasinya pandangan mereka bahwa yang ber KB itu adalah perempuan. Masalah data juga masih merupakan hal yang perlu diperhatikan. Untuk lebih jelasnya kesenjangan kapasitas ini dapat dilihat pada matriks 105.

### Matriks 105

#### Analisis Kesenjangan Kapasitas BKKB dan PP sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam masalah Hak Kesehatan Bagi Perempuan

PEMEGANG KLAIM	SUAMI	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
KAPASITAS					
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intervensi program KB yang kurang melibatkan suami/laki-laki sebagai sasaran KB</li> <li>Perspektif aparat tentang KB masih banyak ke perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang bertanggung jawab dalam usaha menghilangkan anggapan bahwa yang pantas KB hanya perempuan</li> <li>Belum ada desain program yang berkelanjutan ke masyarakat tentang KB bagi laki-laki</li> <li>Kurang terjalin komunikasi dengan para suami agar tidak risih menggunakan alat kontrasepsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum melibatkan pemimpin masyarakat secara efektif dalam mensosialisasikan gerakan KB bagi laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif lintas sektoral</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Dari matriks 105 menunjukkan bahwa kedua unit kerja ini yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB & PP) serta Dinas Kesehatan, masih memiliki kesenjangan kapasitas dengan para pemegang hak dalam memenuhi hak kesehatan perempuan terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi. Seperti halnya dengan para pengemban tugas lainnya, di instansi ini juga masih didominasi oleh perspektif yang menganggap KB itu identik dengan sasarannya perempuan. Persoalan lainnya lagi adalah masih terbatasnya alat kontrasepsi bagi laki-laki, yaitu hanya kondom dan vasektomi. Pelibatan berbagai pihak baik suami, kelompok masyarakat maupun para pemimpin masyarakat dalam kegiatan sosialisasi memang belum optimal, sehingga para sasaran ini belum memahami betul tentang pentingnya melibatkan laki-laki sebagai sasaran dalam program KB.

## Matriks 106

### Analisis Kesenjangan Kapasitas Dinas Kesehatan sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Kesehatan bagi Perempuan

PEMEGANG KLAIM KAPASITAS	SUAMI	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervensi program KB yang kurang melibatkan suami/laki-laki sebagai sasaran KB</li> <li>• Perspektif aparat tentang KB masih banyak ke perempuan</li> <li>• Penyediaan alat kontrasepsi masih dominan kepada perempuan, sedangkan laki-laki masih sangat terbatas. Hanya dalam bentuk kondom dan vasektomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang bertanggung jawab dalam usaha menghilangkan anggapan bahwa yang pantas KB hanya perempuan</li> <li>• Belum ada desain program yang berkelanjutan ke masyarakat tentang KB bagi laki-laki</li> <li>• Kurang terjalin komunikasi dengan para suami agar tidak risih menggunakan alat kontrasepsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum melibatkan pemimpin masyarakat secara efektif dalam mensosialisasikan gerakan KB bagi laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif antar instansi terkait</li> <li>• Belum tersedianya data base yang akurat (<i>by name by address</i>)</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Banyaknya alat kontrasepsi yang ditujukan terhadap perempuan karena rendahnya penggunaan alat kontrasepsi pada laki-laki dapat disebabkan oleh adanya kesenjangan kapasitas Pemda sebagai pengemban tugas terhadap pemegang hak. Utamanya karena kurangnya sosialisasi untuk memberikan pemahaman bahwa laki-laki (suami) juga dapat ber KB. Di satu sisi Pemda telah menjalankan berbagai kebijakan terkait peningkatan penggunaan Alat Kontrasepsi pada laki-laki dan menjalin komunikasi dengan lurah dan camat. Namun di sisi lain, data mengenai jumlah laki-laki yang ber KB masih kurang lengkap/akurat, serta masih kurangnya keterlibatan laki-laki dalam mensosialisasikan alat kontrasepsi.

### 3.2. Analisis Kesenjangan Kapasitas Pemegang Hak

**Matriks 107**

Analisis Kesenjangan Kapasitas Orang Tua sebagai Pemegang Hak untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban tugas Dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PENGEMBAN TUGAS / KAPASITAS	Orang Tua	Keluarga	Kelurahan/Desa	BKKB dan KB	Dinas Kesehatan
TANGGUNG JAWAB		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang mampu berkomunikasi ke keluarga besar tentang pelibatan laki-laki dalam ber KB</li> <li>Pemahaman tentang KB bagi laki-laki yang masih kurang</li> <li>Anggapan bahwa tabu bagi laki-laki menggunakan alat kontrasepsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terlibat aktif dalam kegiatan di desa, karena tidak mendapatkan undangan ataupun karena keterbatasan kondisi geografis</li> <li>Tidak mampu menyampaikan masalahnya ke pihak kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memberikan informasi yang akurat</li> <li>Masih resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memberikan informasi yang akurat</li> <li>Masih resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Berdasarkan Matriks 107 terlihat bahwa masih ada kesenjangan kapasitas orang tua dalam menuntut hak-haknya kepada pengemban tugas terkait dengan hak kesehatan bagi perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi. Kesenjangan ini diantaranya kemampuan komunikasi dan pemahaman yang terbatas, partisipasi dalam kegiatan di tingkat desa yang kurang, serta resistensi terhadap program KB bagi laki-laki yang masih dominan.

Kesenjangan kapasitas orang tua di atas tidak jauh beda dengan kesenjangan kapasitas yang ada pada keluarga. Kondisi ini secara jelas dapat dilihat pada Matriks 108 dibawah ini:

### Matriks 108

Analisis Kesenjangan Kapasitas Keluarga sebagai Pemegang Hak untuk Menuntut Hak-haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PENGEMBAN TUGAS / KAPASITAS	Orang Tua	KELUARGA	Kelurahan/Desa	BKKB dan KB	Dinas Kesehatan
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tabu membicarakan masalah KB bagi laki-laki ke orang tua</li> <li>Pemahaman tentang KB bagi laki-laki yang masih kurang</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terlibat aktif dalam kegiatan di desa, karena tidak mendapatkan undangan ataupun karena keterbatasan kondisi geografis</li> <li>Tidak mampu menyampaikan masalahnya ke pihak kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memberikan informasi yang akurat</li> <li>Masih resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>Tidak bisa memilih jenis alat kontrasepsi yang lebih baik karena jenisnya masih sangat terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memberikan informasi yang akurat</li> <li>Masih resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>Tidak bisa memilih jenis alat kontrasepsi yang lebih baik karena jenisnya masih sangat terbatas</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Adapun kesenjangan kapasitas masyarakat pemegang hak untuk menuntut hak-haknya kepada pengemban tugas dalam kaitannya dengan hak kesehatan bagi perempuan dapat dilihat pada matriks 109.

### Matriks 109

#### Analisis Kesenjangan Kapasitas Masyarakat sebagai Pemegang Hak untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PENGEMBAN TUGAS KAPASITAS	Orang Tua	KELUARGA	Kelurahan/Desa	BKKB dan KB	Dinas Kesehatan
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih tabu membicarakan masalah KB bagi laki-laki ke orang tua</li> <li>• Pemahaman tentang KB bagi laki-laki yang masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang mampu menkomunikasikan ke keluarga besar tentang pelibatan laki-laki dalam ber KB</li> <li>• Pemahaman tentang KB bagi laki-laki yang masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terlibat aktif dalam kegiatan di desa, karena tidak mendapatkan undangan ataupun karena keterbatasan kondisi geografis</li> <li>• Tidak mampu menyampaikan masalahnya ke pihak kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>• Tidak bisa memilih jenis alat kontrasepsi yang lebih baik karena jenisnya masih sangat terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memberikan informasi yang akurat</li> <li>• Masih resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>• Tidak bisa memilih jenis alat kontrasepsi yang lebih baik karena jenisnya masih sangat terbatas</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Dari Matriks 109 di atas bahwa kesenjangan kapasitas masyarakat dalam menuntut hak-haknya terkait dengan masalah pemenuhan hak perempuan atas pelayanan KB yang diskriminatif, memang masih banyak dilihat pada aspek pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan alat kontrasepsi yang bukan hanya untuk perempuan tetapi seharusnya juga untuk laki-laki. Namun, hal ini juga terkendala oleh ketersediaan jenis alat kontrasepsi yang memang masih terbatas pilihannya untuk laki-laki. Penyediaan jenis KB ini memang masih lebih banyak ditujukan kepada perempuan.

### Matriks 110

Analisis Kesenjangan Kapasitas Kecamatan sebagai Pemegang Hak untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PENGEMBAN TUGAS KAPASITAS	Orang Tua	KELUARGA	Kelurahan/Desa	BKKB dan KB	Dinas Kesehatan
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum mampu menjangkau semua keluarga dalam kegiatan sosialisasi</li> <li>• Perspektif aparat kecamatan tentang KB yang identik untuk perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum mampu menjangkau semua keluarga dalam kegiatan sosialisasi</li> <li>• Perspektif aparat kecamatan tentang KB yang identik untuk perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan data base yang belum ada</li> <li>• Belum terbangun koordinasi yang efektif dalam mendorong perencanaan yang berperspektif perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>• Pengadaan data base yang belum ada</li> <li>• Belum terbangun koordinasi yang efektif dalam mendorong perencanaan yang berperspektif perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>• Pengadaan data base yang belum ada</li> <li>• Belum terbangun koordinasi yang efektif dalam mendorong perencanaan yang berperspektif perempuan</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

### Matriks 111

#### Analisis Kesenjangan Kapasitas Dinas Kesehatan sebagai Pemegang Hak untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PENGEMBAN TUGAS / KAPASITAS	Orang Tua	KELUARGA	Kelurahan/Desa	BKKB dan KB	Dinas Kesehatan
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum mampu menjangkau semua keluarga dalam kegiatan sosialisasi</li> <li>• Perspektif aparat tentang KB yang identik untuk perempuan</li> <li>• Belum menyediakan pilihan alat kontrasepsi yang lebih beragam untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum mampu menjangkau semua keluarga dalam kegiatan sosialisasi</li> <li>• Perspektif aparat kecamatan tentang KB yang identik untuk perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan data base yang masih terbatas</li> <li>• Belum terbangun koordinasi yang efektif dalam mendorong perencanaan yang berperspektif perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>• Pengadaan data base yang belum ada</li> <li>• Belum terbangun koordinasi yang efektif dalam mendorong perencanaan yang berperspektif perempuan</li> </ul>	
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Dari Matriks 111 di atas terlihat bahwa kecamatan dan dinas kesehatan memang masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau semua lapisan masyarakat sampai ke tingkat rumah tangga dalam mensosialisasikan KB untuk laki-laki. Persoalan lainnya juga adalah belum mampu menyediakan jenis alat kontrasepsi yang lebih beragam untuk laki-laki, ketersediaan data yang akurat dan koordinasi lintas sector yang belum berjalan secara optimal juga menjadi penghambat tercapainya pemenuhan hak perempuan. Namun yang paling penting adalah persoalan perspektif berbagai pihak tentang alat kontrasepsi yang bukan hanya ditujukan kepada perempuan tetapi juga seharusnya kepada laki-laki.

**C. Tindakan / Aksi Kunci**

**1. Identifikasi Aksi-Aksi Kunci**

**Usulan Aksi Kunci Mengurangi Kesenjangan Pengemban Tugas**

Identifikasi aksi kunci adalah langkah untuk mengetahui tentang upaya yang perlu dilakukan agar setiap pemegang hak maupun pengemban tugas dapat mendukung pencapaian hak kesehatan bagi perempuan terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi. Pada Matriks 112, teridentifikasi usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas orang tua sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan hak kesehatan bagi perempuan

**Matriks 112**

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Orang Tua sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PEMEGANG KLAIM	SUAMI	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
KAPASITAS					
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang tua proaktif memberikan pemahaman bahwa suami juga dapat ber KB</li> <li>Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang KB bagi laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>menghilangkan anggapan bahwa yang pantas KB hanya perempuan</li> <li>memberikan pemahaman bahwa suami juga dapat ber KB</li> <li>Dimotivasi dan difungsikan dalam memberikan pemahaman mengenai bahwa suami juga dapat ber KB</li> <li>Menjalin komunikasi dengan para suami agar tidak risih menggunakan alat kontrasepsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlibat aktif dalam kelompok masyarakat untuk mensosialisasikan jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> <li>Melibatkan laki-laki dalam mensosialisasikan jenis alat kontrasepsi</li> <li>Membentuk kelompok masyarakat yang peduli KB</li> <li>-</li> <li>Menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat keluarga lainnya mengenai jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan data yang akurat</li> <li>Meningkatkan kepekaan aparat desa terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi</li> <li>Mendorong penyediaan alokasi anggaran untuk mendukung penerapan program KB yang berperspektif gender</li> <li>memberikan informasi yang akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang Mendapatkan motivasi dan fungsi dalam pengambilan keputusan</li> <li>Membantu kecamatan dalam mensurvey jumlah laki-laki yang ber KB</li> <li>Merumuskan kebijakan KB yang berperspektif gender</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Dari Matriks 112 terlihat bahwa berbagai usulan aksi yang bisa dilakukan agar orang tua dapat melaksanakan tugasnya dalam kaitannya dengan hak kesehatan bagi perempuan. Diantaranya dengan memberikan pemahaman bahwa suami juga dapat ber KB, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang KB bagi laki-laki, dan sebagainya. Adapun usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas keluarga, dapat dilihat pada Matriks 113

### Matriks 113

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Keluarga sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PEMEGANG KLAIM KAPASITAS	SUAMI	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dengan melibatkan suami sebagai sasaran</li> <li>Menjadikan suami sebagai sasaran program KB dalam perencanaan di tingkat desa/kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertanggung jawab dalam usaha menghilangkan anggapan bahwa yang pantas KB hanya perempuan</li> <li>Memotivasi dan berperan dalam memberikan pemahaman mengenai bahwa suami juga dapat ber KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlibat dalam kelompok masyarakat dalam mensosialisasikan jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> <li>Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung pengadaan data yang akurat</li> <li>Meningkatkan kepekaan aparat kecamatan tentang isu kesetaraan gender</li> <li>Tidak mampu memberikan informasi yang akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan frekuensi sosialisasi tentang KB untuk laki-laki</li> <li>Intervensi program KB kepada laki-laki</li> <li>Mendorong peningkatan alokasi anggaran yang berperspekti kesetaraan gender tentang penggunaan alat kontrasepsi bagi laki-laki</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Dari Matriks 113 terlihat bahwa untuk mengurangi kesenjangan kapasitas keluarga sebagai pengemban tugas diantaranya melibatkan para suami dalam kegiatan sosialisasi KB. Selain itu masih menjadikan suami sebagai sasaran program KB dalam perencanaan di tingkat desa/kelurahan masalah data juga masih merupakan hal yang perlu diperhatikan.

### Matriks 114

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Kelurahan/Desa sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PEMEGANG KLAIM / KAPASITAS	SUAMI	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan frekuensi sosialisasi dengan melibatkan suami sebagai sasaran</li> <li>Mendorong kesetaraan gender dalam ber KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bertanggung jawab dalam usaha menghilangkan anggapan bahwa yang pantas KB hanya perempuan</li> <li>Memotivasi dan berperan dalam memberikan pemahaman mengenai bahwa suami juga dapat ber KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berperan aktif dalam kelompok masyarakat dalam mensosialisasikan jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> <li>Meningkatkan pengetahuan tentang kesetaraan gender dalam ber KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan data yang akurat</li> <li>Meningkatkan kepekaan aparat kecamatan terhadap apa yang terjadi. Kurang pengetahuan.</li> <li>memberikan informasi yang akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berfungsi dalam pengambilan keputusan</li> <li>mensosialisasikan tentang KB untuk laki-laki</li> <li>Intervensi program KB untuk laki-laki</li> <li>Mendorong pengalokasian anggaran untuk mengatasi ketimpangan penggunaan alkon antar perempuan dan laki-laki</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Dari Matriks 114 terlihat bahwa pengurangan kesenjangan kapasitas kelurahan/desa sebagai pengemban tugas diantaranya dengan melibatkan para suami dalam kegiatan sosialisasi KB. Selain itu merubah cara pandang mereka bahwa yang ber KB itu bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki. Masalah data juga masih merupakan hal yang perlu diperhatikan. Untuk lebih jelasnya kesenjangan kapasitas ini dapat dilihat pada matriks 115.

### Matriks 115

#### Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas BKKB dan PP sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PEMEGANG KLAIM	SUAMI	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
KAPASITAS					
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intervensi program KB yang melibatkan suami/laki-laki sebagai sasaran KB</li> <li>Membangun Perspektif aparat tentang KB yang setara antara laki-laki dan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertanggung jawab dalam usaha menghilangkan anggapan bahwa yang pantas KB hanya perempuan</li> <li>Mendesain program yang berkelanjutan ke masyarakat tentang KB bagi laki-laki</li> <li>Menjalin komunikasi dengan para suami agar tidak risih menggunakan alat kontrasepsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan pemimpin masyarakat secara efektif dalam mensosialisasikan gerakan KB bagi laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan instansi terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif lintas sektoral</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Dari matriks 115 menunjukkan bahwa kedua unit kerja ini yaitu BKKB dan Pemberdayaan Perempuan serta Dinas Kesehatan, dibutuhkan berbagai aksi kunci untuk mengurangi kesenjangan kapasitasnya dalam memenuhi hak kesehatan perempuan terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi. Seperti halnya dengan para pengemban tugas lainnya, di instansi ini juga perlu dibangun perspektif bahwa KB itu tidak identik dengan sarannya perempuan tetapi juga laki-laki. Selain itu mendorong pengadaan alat kontrasepsi yang lebih banyak jenisnya bagi laki-laki. Pelibatan berbagai pihak baik suami, kelompok masyarakat maupun para pemimpin masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perlu dioptimalkan, sehingga para sasaran ini memahami betul tentang pentingnya melibatkan laki-laki sebagai sasaran dalam program KB.

### Matriks 116

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Dinas Kesehatan sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PEMEGANG KLAIM / KAPASITAS	SUAMI	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervensi program KB yang melibatkan suami/laki-laki sebagai sasaran KB</li> <li>• Perspektif aparat tentang KB masih banyak ke perempuan</li> <li>• Penyediaan alat kontrasepsi laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab dalam usaha menghilangkan anggapan bahwa yang pantas KB hanya perempuan</li> <li>• Mendesain program yang berkelanjutan ke masyarakat tentang KB bagi laki-laki</li> <li>• Menjalin komunikasi dengan para suami agar tidak risih menggunakan alat kontrasepsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melibatkan pemimpin masyarakat secara efektif dalam mensosialisasikan gerakan KB bagi laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif antar instansi terkait</li> <li>• Menyediakan data base yang akurat (<i>by name by address</i>)</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Untuk mengurangi kesenjangan kapasitas Dinas Kesehatan sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan hak kesehatan bagi perempuan, dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- Intervensi program KB yang melibatkan suami/laki-laki sebagai sasaran KB
- Perspektif aparat tentang KB masih banyak ke perempuan
- Penyediaan alat kontrasepsi laki-laki
- Menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif antar instansi terkait
- Menyediakan data base yang akurat (*by name by address*)

Lebih jelasnya aksi kunci tersebut dapat dilihat pada Matriks 117

### 3.2. Usulan Aksi Kunci Untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Pemegang Hak

#### Matriks 117

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Orang Tua sebagai Pemegang Hak dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PENGEMBAN TUGAS / KAPASITAS	Orang Tua	KELUARGA	Kelurahan/Desa	BKKB dan KB	Dinas Kesehatan
TANGGUNG JAWAB		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan berkomunikasi ke keluarga besar tentang pelibatan laki-laki dalam ber KB</li> <li>• Meningkatkan Pemahaman tentang KB bagi laki-laki</li> <li>• Anggapan bahwa tabu bagi laki-laki menggunakan alat kontrasepsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlibat aktif dalam kegiatan di desa,</li> <li>• Meningkatkan kemampuan menyampaikan masalahnya ke pihak kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memberikan informasi yang akurat</li> <li>• Mengurangi resistensi terhadap program KB bagi laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memberikan informasi yang akurat</li> <li>• Mengurangi resistensi terhadap program KB bagi laki-laki</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Berdasarkan Matriks 117, terlihat bahwa mengurangi kesenjangan kapasitas orang tua dalam menuntut hak-haknya kepada pengemban tugas terkait dengan Hak Kesehatan bagi perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi, adalah dengan meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemahaman tentang KB untuk laki-laki, Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan di tingkat desa, serta mengurangi resistensi terhadap program KB bagi laki-laki yang masih dominan.

Pengurangan kesenjangan kapasitas orang tua di atas tidak jauh beda dengan usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas bagi keluarga. Hal ini secara jelas dapat dilihat pada Matriks 118

### Matriks 118

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Keluarga sebagai Pemegang Hak dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PENGEMBAN TUGAS	Orang Tua	KELUARGA	Kelurahan/Desa	BKKB dan KB	Dinas Kesehatan
KAPASITAS					
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender dalam ber KB</li> <li>• Meningkatkan Pemahaman tentang KB bagi laki-laki</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlibat aktif dalam kegiatan di desa, karena tidak mendapatkan undangan ataupun karena keterbatasan kondisi geografis</li> <li>• Meningkatkan mampu menyampaikan masalahnya ke pihak kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan informasi yang akurat</li> <li>• Mengurangi resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>• Penyediaan jenis alkon yang lebih variatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memberikan informasi yang akurat</li> <li>• Masih resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>• Tidak bisa memilih jenis alat kontrasepsi yang lebih baik karena jenisnya masih sangat terbatas</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Adapun usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas masyarakat pemegang hak untuk menuntut hak-haknya kepada pengemban tugas dalam kaitannya dengan hak kesehatan bagi perempuan dapat dilihat pada Matriks 119

### Matriks 119

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Masyarakat sebagai Pemegang Hak dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PENGEMBAN TUGAS	Orang Tua	KELUARGA	Kelurahan/Desa	BKKB dan KB	Dinas Kesehatan
KAPASITAS					
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender dalam ber KB</li> <li>Meningkatkan Pemahaman tentang KB bagi laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan ke keluarga besar tentang pelibatan laki-laki dalam ber KB</li> <li>Pemahaman tentang KB bagi laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>terlibat aktif dalam kegiatan di desa, karena tidak mendapatkan undangan ataupun karena keterbatasan kondisi geografis</li> <li>Meningkatkan kemampuan menyampaikan masalahnya ke pihak kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>Penyediaan jenis alkon yang lebih variatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memberikan informasi yang akurat</li> <li>Mengurangi resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>Penyediaan jenis alkon yang lebih variatif</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Dari Matriks 119 di atas bahwa langkah untuk mengurangi kesenjangan kapasitas masyarakat dalam menuntut hak-haknya terkait dengan masalah pemenuhan hak perempuan atas pelayanan KB yang diskriminatif, dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan alat kontrasepsi yang bukan hanya untuk perempuan tetapi seharusnya juga untuk laki-laki. Selain itu juga perlu dijamin ketersediaan jenis alat kontrasepsi yang lebih banyak jenis pilihannya untuk laki-laki.

### Matriks 120

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Kecamatan sebagai Pemegang Hak dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PENGEMBAN TUGAS KAPASITAS	Orang Tua	KELUARGA	Kelurahan/Desa	BKKB dan KB	Dinas Kesehatan
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Menjangkau semua keluarga dalam kegiatan sosialisasi</li> <li>•Membangun Perspektif aparat kecamatan tentang KB bukan hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Menjangkau semua keluarga dalam kegiatan sosialisasi</li> <li>•Membangun Perspektif aparat kecamatan tentang KB bukan hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pengadaan data base yang belum ada</li> <li>•Membangun koordinasi yang efektif dalam mendorong perencanaan yang berperspektif perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mengurangi resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>•Pengadaan data base yang belum ada</li> <li>•Membangun koordinasi yang efektif dalam mendorong perencanaan yang berperspektif perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mengurangi resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>•Pengadaan data base yang belum ada</li> <li>•Membangun koordinasi yang efektif dalam mendorong perencanaan yang berperspektif perempuan</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

### Matriks 121

#### Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Kabupaten sebagai Pemegang Hak dalam Kaitannya dengan Hak Kesehatan bagi Perempuan

PENGEMBAN TUGAS	Orang Tua	KELUARGA	Kelurahan/Desa	BKKB dan KB	Dinas Kesehatan
KAPASITAS					
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>menjangkau semua keluarga dalam kegiatan sosialisasi</li> <li>Membangun Perspektif aparat kecamatan tentang KB bukan hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>menjangkau semua keluarga dalam kegiatan sosialisasi</li> <li>Membangun Perspektif aparat kecamatan tentang KB bukan hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan data base yang belum ada</li> <li>Membangun koordinasi yang efektif dalam mendorong perencanaan yang berperspektif perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi resisten terhadap program KB bagi laki-laki</li> <li>Pengadaan data base yang belum ada</li> <li>Membangun koordinasi yang efektif dalam mendorong perencanaan yang berperspektif perempuan</li> </ul>	Mendorong pengalokasian anggaran yang pro perempuan
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Dari Matriks 121 di atas terlihat bahwa untuk mengurangi kesenjangan kapasitas kecamatan dan dinas kesehatan, maka dibutuhkan upaya sebagai berikut:

- Memperluas target sasaran baik berdasarkan wilayah maupun ke perseorangan
- Penyediaan alkon yang lebih variatif bagi laki-laki.
- Menyediakan data yang akurat
- Membangun perspektif berbagai pihak tentang alat kontrasepsi yang bukan hanya ditujukan kepada perempuan tetapi juga seharusnya kepada laki-laki.

### Matriks 122

Usulan Aksi untuk Mempersempit Kesenjangan Kapasitas Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Pengembang Tugas dalam Kaitannya Hak Kesehatan bagi Perempuan

PEMEGANG HAK / KAPASITAS	ORANG TUA	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan dan Membantu orang tua dalam memberikan pemahaman bahwa laki-laki (suami) juga dapat ber KB</li> <li>Memberikan pelatihan kepada orang tua tentang penggunaan alat kontrasepsi</li> <li>Menyediakan berbagai jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan dan Membantu keluarga dalam memberikan pemahaman bahwa laki-laki (suami) juga dapat ber KB</li> <li>Memberikan pelatihan kepada keluarga tentang penggunaan alat kontrasepsi</li> <li>Menyediakan berbagai jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan pemimpin masyarakat dalam mensosialisasikan jenis-jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> <li>Memberikan pelatihan kepada anggota masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi</li> <li>Melibatkan pemimpin masyarakat dalam pengambilan keputusan dan sosialisasi alat kontrasepsi</li> <li>Menjalin komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan pihak kecamatan dalam mensosialisasikan jenis-jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> <li>Memberikan informasi yang akurat mengenai data jumlah laki-laki yang ber KB</li> <li>Menjalin komunikasi dengan instansi terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau kebijakan, penggunaan dana dan aparat</li> <li>Mendorong pendataan yang lebih akurat</li> <li>Melatih aparat dlm perencanaan penganggaran</li> <li>Menjalin komunikasi dengan instansi terkait</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Untuk mempersempit/mengurangi kesenjangan kapasitas Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) sebagai pengembang tugas dalam kaitannya dengan tingginya pemakaian alat kontrasepsi untuk perempuan, maka diperlukan partisipasi dari seluruh pihak, mulai dari masyarakat hingga Pemerintah. Dalam hal ini masing-masing memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda namun saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, orang tua bertanggungjawab membantu dalam memberikan pemahaman bahwa laki-laki (suami) juga dapat ber KB, pemimpin masyarakat bertanggung jawab melibatkan masyarakat dalam mensosialisasikan jenis-jenis alat kontrasepsi. Sedangkan kabupaten bertanggung jawab dalam memantau penggunaan dana dan aparat.

### Matriks 123

Usulan Aksi untuk Mempersempit Kesenjangan Kapasitas Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Pengembang Tugas dalam Kaitannya Hak Kesehatan bagi Perempuan

PEMEGANG HAK / KAPASITAS	ORANG TUA	KELUARGA	PEMIMPIN MASYARAKAT	OTORITAS KECAMATAN	OTORITAS KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan dan Membantu orang tua dalam memberikan pemahaman bahwa laki-laki (suami) juga dapat ber KB</li> <li>Memberikan pelatihan kepada orang tua tentang penggunaan alat kontrasepsi</li> <li>Menyediakan berbagai jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan dan Membantu keluarga dalam memberikan pemahaman bahwa lai-laki (suami) juga dapat ber KB</li> <li>Memberikan pelatihan kepada keluarga tentang penggunaan alat kontrasepsi</li> <li>Menyediakan berbagai jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan pemimpin masyarakat dalam mensosialisasikan jenis-jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki</li> <li>Memberikan pelatihan kepada anggota masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi</li> <li>Melibatkan pemimpin masyarakat dalam pengambilan keputusan dan sosialisasi Alat Kontrasepsi</li> <li>Menjalin komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan pihak kecamatan dalam mensosialisasikan jenis-jenis alat kontraasepsi untuk laki-laki</li> <li>Memberikan informasi yang akurat mengenai data jumlah laki-laki yang ber KB</li> <li>Menjalin komunikasi dengan instansi terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau kebijakan, penggunaan dana dan aparat</li> <li>Mendorong pendataan yang lebih akurat</li> <li>Melatih aparat dlm perencanaan penganggaran</li> <li>Menjalin komunikasi dengan instansi terkait</li> </ul>
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

## 2. Identifikasi dan Analisis Pengembangan kemitraan

**Matriks 124**  
Pemetaan Pemangku Kepentingan  
untuk Masalah Banyaknya Alat Kontrasepsi bagi Perempuan

		BERDASARKAN ARTI PENTING	
		Tidak diketahui/tidakada/kurang	Penting atau bahkan sangat penting
BERDASARKAN PENGARUH	Kurang/Tidak ada/tidak diketahui	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang tua</li> <li>- Keluarga dan masyarakat sekitar</li> </ul>
	Besar atau bahkan sangat besar	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kabupaten (Bupati)</li> <li>- Camat</li> <li>- Lurah/Desa</li> </ul>

Berdasarkan Matriks 124 di atas mengenai pemetaan pemangku kepentingan, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki arti penting meskipun kurang berpengaruh terhadap pengembangan kemitraan. Dalam hal pemangku kepentingan dalam pengembangan kemitraan, pemerintah kabupaten (Bupati), camat, dan lurah/desa memiliki arti penting dan sangat berpengaruh dalam pengembangan kemitraan.

### 3. Strategi Pengembangan Kemitraan

**Matriks 125**  
Strategi Pengembangan Kemitraan  
untuk Masalah Banyaknya Alat Kontrasepsi bagi Perempuan

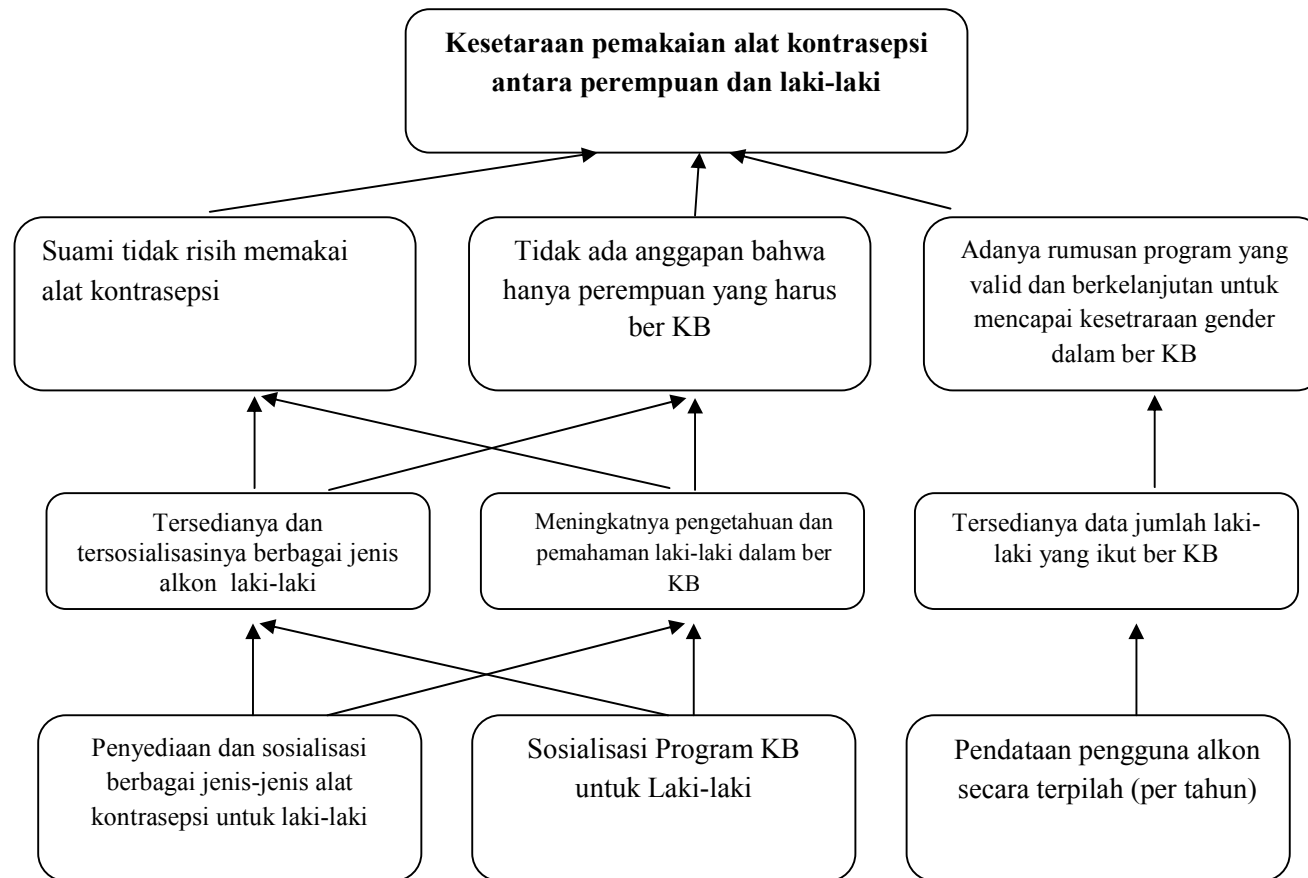
Mitra Potensial	Apa yang dapat mereka lakukan	Apa yang mereka butuhkan	Strategi pengembangan kemitraan yang perlu dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)
Keluarga	Memberikan pemahaman bahwa laki-laki (suami) juga dapat ber KB	Sosialisasi mengenai jenis-jenis alat kontrasepsi untuk laki-laki	Memberikan sosialisasi dan melibatkan laki-laki mengenai jenis alat kontrasepsi
Orang Tua	Menghilangkan keengganan laki-laki dalam ber KB	Sosialisasi mengenai jenis-jenis alat kontrasepsi	Memberikan sosialisasi dan melibatkan laki-laki mengenai jenis alat kontrasepsi
Masyarakat	Terlibat dalam mensukseskan program KB	Sosialisasi mengenai jenis-jenis alat kontrasepsi	Menyediakan data jumlah PUS yang ber KB
Pemerintah	Memantau program KB	Aparat dan Anggaran	Melatih petugas dan terjun langsung memantau keadaan dilapangan serta menggunakan anggaran yang tepat

Berdasarkan Matriks 125 di atas, dapat dilihat strategi pengembangan kemitraan yang perlu dilakukan oleh keluarga dan orang tua sebagai mitra potensial adalah memberikan pemahaman bahwa laki-laki juga dapat ber KB. Masyarakat utamanya laki-laki perlu ikut serta dalam sosialisasi mengenai jenis alat kontrasepsi. Serta ikut dalam mensukseskan program KB itu sendiri, Sedangkan strategi yang perlu dilakukan pemerintah adalah melatih petugas dan terjun langsung memantau keadaan dilapangan serta menggunakan anggaran yang tepat.

#### 4. Rancangan Program

##### 1. Pohon Tujuan

**Gambar 12**  
Pohon Tujuan Kesetaraan Pemakai Alat Kontrasepsi  
antara Perempuan dan Laki-laki



## 2. Matriks Logframe

**Matriks 126**  
Matrik Logframe  
untuk Kesetaraan Pemakai Alat Kontrasepsi antara Perempuan dan Laki-laki

Hierarki hasil	Indikator	Waktu (dalam tahun)					Cara Verifikasi	SKPD yang bertanggungjawab	Perkiraan Anggaran	Resiko dan Asumsi
		2010	2011	2012	2013	2014				
Sasaran: Terwujudnya Kesetaraan pemakaian alat kontrasepsi antara perempuan dan laki-laki										
Tujuan 1. Suami tidak risih menggunakan alkon										
Hasil 1.1. Tersosialisasinya berbagai jenis alkon bagi laki-laki										
Kegiatan 1. Sosialisasi Alkon bagi laki-laki	Jumlah sasaran	✓	✓				Laporan Kegiatan Luas cakupan wilayah Hasil Monev	Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Kesehatan	Rp. 150.000.000,-	Tingginya resistensi masyarakat
Hasil 1.2. Tersedianya berbagai pilihan Alkon bagi laki-laki										
Kegiatan. 2 Pengadaan alkon yang variatif bagi laki-laki	Jenis alkon yang diproduksi	✓	✓	✓	✓	✓	Jenis Alkon yang dibuat	Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Kesehatan	Rp. 500.000.000,-	Tingginya resistensi masyarakat
Tujuan 2. Tidak ada anggapan bahwa hanya perempuan yang harus ber KB										
Hasil 2.1 Meningkatkan pemahaman laki-laki tentang KB										
Kegiatan 2.1 Sosialisasi KB untuk laki-laki	Jumlah sasaran	✓	✓				Laporan Kegiatan Hasil Monev	Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Kesehatan	Rp. 150.000.000,-	Tingginya resistensi masyarakat
Tujuan 3. Adanya rumusan program yang valid dan berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan gender dalam ber KB										
Hasil 3.1. Tersedianya data jumlah laki-laki yang ikut ber KB										
Kegiatan 3.1 Pendataan pengguna alkon secara terpilah (per tahun)	Validitas data	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen pendataan	Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Kesehatan	Rp. 500.000.000,-	Luas jangkauan wilayah dan kondisi geografis